

# Dua Mantan Kelian Ditahan

★ Korupsi Santunan Kematian Jembrana

Bangli (Bali Post) -

hal 14 BP 10/01/19

Lima orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bangli yang pernah dihukum karena terjerat kasus korupsi, telah diberhentikan secara tidak hormat akhir tahun lalu. Pemberhentian itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari adanya amanat surat keputusan bersama tiga menteri (Mendagri, Menpan dan RB, Kepala BKN) tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Bangli Ni Putu Koesalireni saat dikonfirmasi Rabu (9/1) kemarin mengatakan, kelima PNS itu sudah resmi diberhentikan akhir Desember 2018 lalu. SK pemberhentiannya kini sedang dalam proses pembagian. Saat diberhentikan, kelima PNS itu berstatus sebagai staf. "Mulai

tanggal 1 Januari lalu kelimanya sudah tidak lagi menjadi PNS," terangnya.

Koesalireni menjelaskan, pemberhentian kelima PNS itu melalui serangkaian proses. Berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional X per tanggal 10 September perihal penyampaian data PNS terlibat tipikor, awalnya disebutkan tiga nama PNS yang direko-

mendasikan untuk diberhentikan. Namun jumlah PNS yang direkomendasikan bertambah menjadi empat orang menyusul keluarnya surat dari BKN per tanggal 2 Oktober. Dalam surat BKN yang kedua itu, terdapat sebuah klausul yang mengharuskan pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati untuk menjatuhkan sanksi yang sama jika ditemukan ada PNS yang pernah

dipenjara karena kasus korupsi, di luar dari data yang telah diberikan BKN. Menindaklanjuti surat itu, pada akhirnya Bupati Bangli mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian untuk lima PNS yang pernah dihukum karena kasus korupsi.

Dikatakan oleh Koesalireni bahwa selain lima PNS tersebut, Bupati juga mengeluarkan SK pemberhentian terhadap satu orang PNS yang telah pensiun. Dia diberhentikan lantaran saat masih aktif berdinis. PNS tersebut pernah dihukum karena kasus pidana korupsi. "SK pemberhentiannya terbit berbarengan, tapi prosesnya tidak sama. Karena usulan pemberhentian terhadap pegawai itu sudah diajukan Bupati ke presiden, sebelum

turunnya SKB 3 menteri," jelasnya.

Kini pascaadanya sanksi pemberhentian lima PNS tersebut, pejabat asal Desa Sekaan, Kintamani ini berharap ke depannya tidak ada lagi PNS yang tersangkut kasus korupsi. Pihaknya mengimbau kepada semua pegawai untuk selalu berhati-hati dan berpedoman dengan aturan yang ada dalam melaksanakan tugas. "Saya dan pegawai lainnya juga berpotensi seperti itu bila tidak berhati-hati. Untuk itu saya imbau ke semua terutama staf saya untuk berhati-hati dan melaksanakan tata kelola pemerintahan sesuai aturan dan terus berkoordinasi dengan pimpinan. Aturan harus dijadikan kamus dan pedoman," kata Koesalireni. (kmb40)

Edisi : Kamis, 10 Januari 2019

Hal : 14



Sidang Kasus Dugaan Korupsi Proyek Biogas

## Terdakwa Seret Kepala BPMDPKBPD dan Pemenang Tender

OKNUM anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung Gede Gita Gunawan dan I Made Catur Adnyana selaku KPA sekaligus PPK menyampaikan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (9/1) kemarin. Sementara Thiarta Ningsih selaku Direktris CV Bhuana Raya tidak bisa menjalani sidang karena sedang melahirkan di salah satu rumah sakit di Denpasar.

Kuasa hukum Gede Gita Gunawan, Agus Sujoko, didampingi Pande Made Sugiarta dan I Made Sugiarta dalam eksepsinya menyampaikan beberapa keberatan atas dakwaan jaksa. Agus Sujoko di hadapan majelis hakim Tipikor pimpinan I Wayan Sukanila pada pokoknya menyampaikan bahwa dakwaan jaksa itu terlalu prematur, tidak jelas dan kabur. Ada beberapa hal pertimbangan yakni, dari perencanaan awal bahwa penerima bantuan biogas yang ditetapkan oleh I Putu Widiada selaku Kepala BPMDPKBPD adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Energi.

"Sehingga kami di sini menilai bahwa dari awal perencanaan, penetapan kriteria pemberian bantuan untuk instalasi biogas telah keliru. Dan itu dilakukan pihak lain, bukan terdakwa Gede Gita Gunawan," tandas Agus Sujoko. Karenanya, dia menilai bahwa yang mesti bertanggung jawab dalam perkara ini adalah pihak perencana, pengawas dan pemenang lelang.

Soal pelelangan, di mana dalam pengadaan biogas ini sebagai pemenang adalah CV Sari Indah Karya dengan Direktur I Nyoman Suartika. Padahal dia tidak pernah menandatangani kontrak dan tidak pernah menerima pembayaran kontrak. Jelas jika melihat konteks itu, bahwa proses lelang cacat hukum. "Itu secara tidak langsung diakui Saudara Jaksa karena dalam dakwaan disebut bahwa Suartika tidak ada menandatangani dokumen penawaran," jelas Sujoko dalam eksepsinya.

Namun faktanya, sesuai dokumen perjanjian kontrak No. 027/1065/BPMDPKBPD/2014 tertanggal 11 September 2014, bahwa perjanjian kontrak itu ditandatangani oleh Made Catur Adnyana selaku KPA dan I Nyoman Suartika selaku Direktur CV Sari Indah Karya. "Sehingga sesuai dengan UU, di antaranya Pasal 1313 KUP Perdata, 1338 KUH Perdata, 1315 KUH Perdata dan 1340 KUH Perdata, bahwa perjanjian itu mengikat kedua belah pihak dan menjadi satu UU bagi pembuatnya dan serta para pihak yang mesti bertanggung jawab," sebut pen-

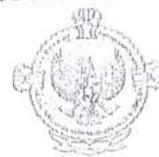
gacara yang berkantor di ARJK Law Office itu.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa atas perjanjian itu, kemudian pekerjaan biogas itu diserahkan oleh CV Sari Indah Karya kepada KPA dalam hal itu Made Catur Adnyana. Sedangkan penyerahan proyek bantuan biogas itu kepada masyarakat diserahkan Putu Widiada selaku Kepala BPMDPKBPD Klungkung, di antaranya pada I Made Bhakta, I Nyoman Yasa, I Wayan Rama dll.

Berdasarkan fakta itu, Sujoko mengatakan jelas bahwa kliennya tidak ada kapasitas dan tidak ada hubungannya dengan proyek biogas tersebut. Sangat naif jika I Gede Gita Gunawan yang notabene adalah anggota dewan, yang tidak punya kapasitas dalam proyek itu, untuk dijadikan terdakwa. Sehingga dengan demikian, dakwaan jaksa dinilai tidak memenuhi unsur yang ditentukan sesuai Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP. "Dengan demikian kami berharap, majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan jaksa batal demi hukum atau tidak dapat diterima," tutup

Edisi : Kamis, 10 Januari 2019

Hal : 12



(Sambungan)

Agus Sujoko.

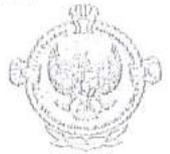
**Kepala BPMDPKBPD**

Sementara itu tim pembela terdakwa I Made Catur Adnyana selaku KPA sekaligus PPK, juga menyampaikan eksepsi. Catur melalui kuasa hukumnya, Wayan Sumardika dkk., menyampaikan bahwa kliennya tidak terlibat dalam dugaan korupsi. Pihak yang dinilai paling bertanggung jawab adalah Kepala SKPD kabupaten dan pemenang tender. "Nah sebagai Kepala BPMPKBPD Klungkung adalah I Putu Widiada. Mestinya dialah yang bertanggung jawab," tegasnya.

Selain itu, berdasarkan fakta dan uraian dakwaan jaksa, bahwa dalam perkara biogas ini mestinya pemenang tender juga ikut terseret. "Dan jelas pula dikatakan bahwa uang negara Rp 792.912.654., pertama kalinya mengalir ke rekening pemenang lelang tersebut," tegas Sumardika. Lebih lanjut dikatakan, konsultan pengawas dan perencana juga mempunyai peran yang sangat penting di samping Pokja II ULP. "Semua itu mesti ikut bertanggung jawab. Begitu juga peran panitia penerima hasil pekerjaan," jelas Sumardika. Dia pun menilai bahwa dakwaan jaksa tidak cermat, kabur dan seharusnya batal demi hukum. (kmb37)

Edisi : Kamis, 10 Januari 2019

Hal : 12



## Terkait Kasus Dugaan Suap dan Korupsi DAK Sejumlah Pejabat Disdikbud Cianjur Jadi Saksi

Cianjur (Bali Post) –

Sejumlah pejabat di lingkungan Disdikbud Cianjur, Jawa Barat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap dan korupsi DAK pendidikan SMP dengan tersangka Bupati Cianjur Irvan Roivano Muchtar dan tiga orang lainnya. "Semua jajaran di Disdikbud sudah saya sampaikan untuk mengikuti prosedur, jadi tidak mungkin akan ada yang mangkir. Kemarin itu hanya masalah teknis. Oleh karena itu, sudah dijadwalkan kembali," kata Sekretaris Disdikbud Cianjur Asep Saepurrohman di Cianjur, Minggu (6/1) kemarin.

Mereka yang dipanggil sebagai saksi staf Sarana dan Prasarana Bidang SMP Disdikbud Cianjur Lutfi Hilari, Kasi Sarana dan Prasarana SD Hendra Munadi serta dua PNS Disdikbud Cianjur masing-masing Budiman dan Dani Nurjaman Al Habsi. Namun, keempat orang tersebut tidak dapat hadir pada panggilan pertama karena surat pang-

gilan yang terlambat sampai dan dijadwalkan kembali pemanggilan ulang pada pekan ini. Jadi, bukan mangkir seperti yang diberitakan.

Sebelumnya, Sekretaris Disdikbud Asep Saepurrohman dan Kasubag Keuangan Disdikbud Mugiana sudah diperiksa KPK dengan status saksi dan seorang *operastional manager* dan asisten direktur hotel di Cipanas. Asep Saepurrohman mengaskan bahwa keempat saksi tersebut bukan mangkir dari panggilan, melainkan surat panggilan baru tiba pada Kamis sore, sementara pemanggilan dijadwalkan pada hari yang sama. Terkait dengan pemeriksaan dirinya sebagai saksi bersama Kasubag Keuangan selama lima jam beberapa waktu lalu, dia ditanya seputar prosedur dan tahapan DAK mulai dari pengajuan proposal, perencanaan, hingga penyaluran.

"Saya menjawab tim penyidik sesuai dengan apa yang saya tahu terkait den-

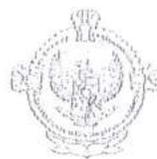
gan prosedur DAK pendidikan. Saya dimintai keterangan secara terpisah selama lima jam," katanya.

Informasi dihimpun, rencanya pada pekan depan sejumlah saksi lainnya akan dipanggil KPK terkait dengan kasus DAK pendidikan tersebut. Bahkan, menurut Asep, sejumlah nama baru akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang menyeret bupati, kepala dinas, kapid, dan kakak ipar bupati itu.

Seperti diberitakan, KPK melakukan operasi tangkapan (OTT) terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar terkait dengan dugaan pemerasan dan suap DAK pendidikan SMP. Irvan ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, Cecep Sobandi (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Rosidin (Kepala Bidang SMP), dan Tubagus Cepy (kakak ipar bupati). KPK mengamankan uang Rp 1.556.700.000 dalam mata uang rupiah pecahan 100 ribu, 50 ribu, dan 20 ribu. (ant)

Edisi : Senin, 7 Januari 2019

Hal : 15



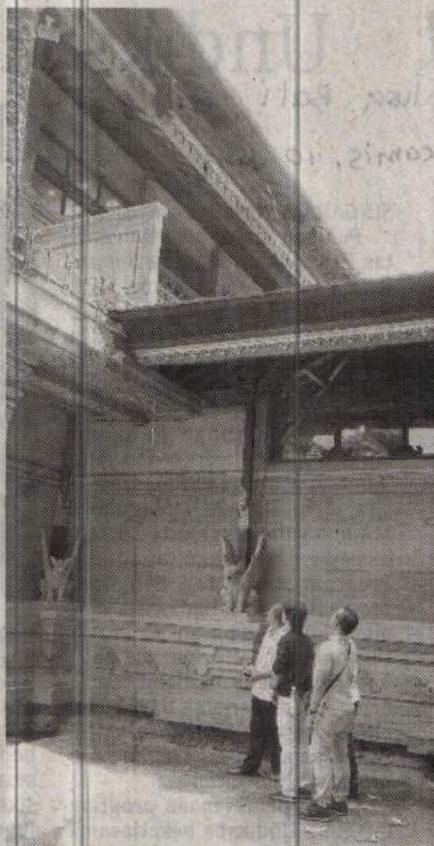
## Dapat Dana DAK Rp 1,6 Miliar, Taman Budaya Perbaiki MMGB

DENPASAR, NusaBali .  
Tahun ini, UPT Taman Budaya Provinsi Bali berhasil mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebesar Rp1,677 miliar. Dari dana bantuan pusat tersebut, pertama yang dilakukan Taman Budaya adalah memperbaiki Gedung Pameran Utama Mahudara Mandara Giri Bhuvana (MMGB) yang juga menyimpan koleksi ratusan karya seni dari maestro seniman Bali.

Kepala UPT Taman Budaya Bali, I Gusti Agung Ngurah Diputra mengatakan, sebelumnya pihaknya mengajukan bantuan senilai Rp2,5 miliar, namun karena Taman Budaya seluruh Indonesia juga mengajukan dana yang bervariasi jumlahnya, akhirnya oleh Dirjen Kebudayaan diberikan alokasi dana yang sama ke masing-masing Taman Budaya di Indonesia.

Menurutnya, DAK tersebut dialokasikan untuk penguatan publik sebesar 65 persen. Penguatan publik ini seperti untuk pagelaran, pameran, dan workshop, sedangkan sisanya sebesar 35 persen dialokasikan untuk rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana (sarpras). "Pertama yang kami lakukan yakni memperbaiki gedung MMGB, karena bagian atap seperti plafon, ijuk, kolam ikan serta yang lainnya memang harus diperbaiki. Anggaran untuk perbaikan gedung ini kurang lebih Rp150 juta," jelas Agung Diputra ditemui saat melakukan pengecekan bersama rekanan, Rabu (9/1) kemarin.

Dikatakan, gedung MMGB

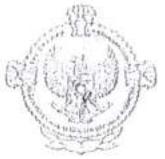


• NUSABALI/EDI

Kepala Taman Budaya Bali Agung Diputra mengecek gedung MMGB yang alami kerusakan, Rabu (9/1).

berlantai dua yang diresmikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Mashuri, pada 14 Februari 1973, belum pernah ada perbaikan sama sekali. Padahal di tempat ini menyimpan koleksi sekitar 930 karya seni dari maestro seniman Bali mulai dari lukisan, patung, topeng, wayang, barong dan karya seni lainnya yang bernilai sejarah tinggi. "Mudah-mudahan dengan perbaikan gedung ini karya-karya tersebut bisa terselamatkan, karena saat hujan beberapa titik mengalami kebocoran," kata Agung Diputra yang kemarin didampingi Kasi Pengembangan dan Penyajian Seni UPT Taman Budaya Bali, AA

Oka. isu



## Badung *Nunggak* Pembayaran, Pengerjaan 24 Proyek Molor

MANGUPURA, NusaBali

Sejumlah proyek fisik di Kabupaten Badung tidak berjalan mulus. Sebab, terdapat proyek yang sampai sekarang masih dikerjakan. Meski begitu, tak semua mendapat denda atas keterlambatan penyelesaian proyek tersebut. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, total ada 24 proyek yang penyelesaiannya molor dari target.

"Betul, ada beberapa proyek yang mundur dari target. Tapi ada juga yang diperpanjang waktunya, sehingga masih proses penyelesaian," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung IB Surya Suamba, Selasa (8/1).

Walau begitu, Surya Suamba tak merinci detail proyek apa saja yang molor, baik yang didenda maupun yang diperpanjang. Namun, beberapa proyek yang molor dan diberikan perpanjangan di antaranya proyek pembangunan ring river di kawasan



PROYEK pembangunan ring river di kawasan Puspem Badung di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi.

Puspem Badung serta proyek pembangunan Pasar Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal.

Mengenai kendala mundurnya proyek-proyek tersebut, pihaknya mengaku ada beberapa hal seperti ada perubahan dan penambahan pekerjaan. "Intinya ada kendala di lapangan seperti perubahan maupun penambahan desain," tuturnya.

Selain itu juga ada penundaan pembayaran kepada rekanan. "Salah satunya

juga itu (penundaan pembayaran kepada rekanan, *Red*). Pemberian kompensasi namanya," ucap Surya Suamba. Walau proyek diperpanjang, tetapi secara keseluruhan Surya Suamba menegaskan proyek yang didanai dari APBD tahun 2018 harus sudah selesai pada Februari-Maret 2019.

Khusus mengenai penundaan pembayaran kepada rekanan, nilainya sekitar Rp 300 miliar. "Kami sudah

sampaikan penundaan pembayaran ini kepada rekanan," katanya.

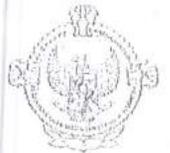
Disinggung kapan sisa pembayaran kepada rekanan akan dilunasi, Surya Suamba tak berani memberikan kepastian. Sebab, sepenuhnya keputusan ada di pimpinan. "Masalah itu (pembayaran kepada rekanan), coba langsung ke Pak Sekda," tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa, saat dikonfirmasi menegaskan segera melunasi pembayaran kepada rekanan. "Kami berterimakasih, karena rekanan mau mengerti kondisi kami, dan tentunya kami akan segera membayar sisa yang belum terbayarkan," ujarnya, kemarin.

Bahkan, pihaknya memastikan akan melunasi semua sisa tunggakan proyek selama satu tahun anggaran. "Ini akan menjadi prioritas kami," tegas Adi Arnawa yang mantan Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Badung itu. **asa**

Edisi : Rabu, 9 Januari 2019

Hal : 2



## Persiapan Pembangunan Pasar Banyuasri

# Biaya Relokasi Pedagang Rp 1,4 Miliar

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng telah menyiapkan dana Rp 1,4 miliar guna merelokasi pedagang di Pasar Banyuasri, menyusul rencana revitalisasi pasar ketiga di Buleleng tersebut. Relokasi dilakukan sekitar April 2019, sebelum bangunan pasar diratakan. Lokasi relokasi dipastikan memanfaatkan areal Terminal Banyuasri yang berjarak beberapa meter dari Pasar Banyuasri.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Buleleng I Ketut Suparto di ruang kerjanya, Selasa (8/1) menjelaskan, jumlah dana relokasi Rp 1,4 miliar, sebagian besar untuk pembangunan tempat penampungan sementara para pedagang tercatat sekitar 1.000 pedagang. Bangunan itu harus dibuat semi permanen, sehingga bisa ditempati hingga dua tahun. Pembangunan tempat penampungan sementara itu diperkirakan menelan dana sebesar Rp 1,3 miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp 100 juta untuk pembuatan detail engineering design (DED) bangunan sementara, pengawasan, termasuk sosialisasi. "Kenapa tempat penampungan sementara harus dibuat semi permanen, karena pengerjaan Pasar Banyuasri dengan lantai tiga itu dikerjakan secara multi years selama dua tahun. Sehingga pedagang menempati tempat penampungan sementara itu bisa sampai dua tahunan," jelasnya.

Dijelaskan, karena nilai pembangunan tempat sementara itu cukup besar Rp 1,3 miliar, maka pembangunannya harus melewati



• NUSABALI/SUDIRTA

KADIS Perindag Buleleng Ketut Suparto saat menunjukkan denah lokasi relokasi pedagang Pasar Banyuasri, Singaraja.

proses tender di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) barang dan jasa. Proses tender diperkirakan awal Pebruari 2019, kemudian pengerjaan tempat penampungan itu diperkirakan sudah dimulai pada bulan Maret 2019. "Makanya kami perkirakan relokasi baru bisa dilaksanakan akhir Maret atau awal April. Setelah relokasi, baru nanti pengerjaan fisik dari bangunan Pasar Banyuasri," imbuh Suparto.

Untuk lokasi relokasi, Kadis Perindag Suparto mengungkapkan, tadinya ada tiga alternative Terminal Banyuasri, Lahan Pemkab di Jalan Teratai, dan sewa lahan. Namun dari tiga alternative itu, Terminal Banyuasri dipilih

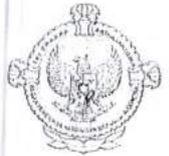
karena tempatnya strategis dekat dengan Pasar Banyuasri, kemudian tidak mengeluarkan biaya sewa. Disamping itu, aktivitas angkutan umum di Terminal Banyuasri juga sedikit, hanya Bus Malam yang sering ngetem menunggu penumpang. "Kalau angkot selama ini kan jarang mereka antre di dalam terminal, yang ada hanya bus malam yang mau berangkat ke Jawa. Kami sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan, untuk bus malam nanti dipindah ke Terminal Cargo di Jalan A Yani," katanya.

Pasar Banyuasri akan dibangun ulang dengan tiga lantai berkonsep semi modern. Pertokoan yang ada disisi Selatan dekat dengan Jalan A Yani, akan digeser agak ke belakang. Lokasinya ini akan dibuat Plaza, sehingga ada areal yang bisa dipakai tempat nongkrong. Plaza tersebut akan didukung dengan kuliner khas Buleleng.

Selain berkonsep semi modern, Pasar Banyuasri nanti akan dijadikan pasar rujukan buah local berkualitas. Sebagai pasar rujukan, satu lantai dikhususkan menjual hasil pertanian local berkualitas. Dalam pembangunan nanti, Pemkab Buleleng, di tahun 2019 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 100 miliar, dari kebutuhan dana sebesar Rp 188 miliar. Proyek ini dikerjakan secara berkesinambungan selama dua tahun hingga tahun 2020. Nantinya, pasar tersebut akan bisa menampung 1.700 pedagang, termasuk pedagang di pasar tumpah yang selama ini memanfaatkan Terminal Banyuasri. **k19**

Edisi : Rabu, 9 Januari 2019

Hal : 4



Tahun 2019, Alokasi Dana Desa Bertambah

## Seluruh Desa Rombak APBDes

**Total ADD yang dialokasikan untuk 129 desa, kini bertambah menjadi Rp 99,939 miliar, naik hampir Rp 5 miliar.**

SINGARAJA, NusaBali

Seluruh desa, 129 desa di Buleleng terpaksa merombak komposisi APBDes tahun

2019, yang sudah rampung disusun. Perombakan itu menyusul adanya tambahan dana yang bersumber dari pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar Rp 5 miliar. Akibat perombakan itu, pengesahan APBDes tahun 2019 pun menjadi molor.

Data dihimpun, Selasa (8/1), dalam penyusunan APBDes, masing-masing desa mengandalkan empat sumber keuangan dari pemerintah. Empat sumber itu yakni Dana Desa (APBN), Pajak Daerah,

Retribusi, dan ADD (APBD). Setelah masing-masing desa menyusun APBDes 2019, ternyata ada tambahan untuk ADD.

Semula untuk 129 desa di Buleleng, total Dana Desa sebesar Rp 106,822 miliar, Pajak Daerah Rp 15,975 miliar, Retribusi Rp 2,275 miliar, dan ADD sebesar Rp 97,822 miliar. Rancangan itu disampaikan sekitar bulan Nopember 2018, kepada seluruh desa yang akan menyusun APBDes tahun 2019. Hingga

pertengahan Desember 2018, rancangan itu masih tidak ada perubahan. Seluruh desa pun sudah merampungkan penyusunan APBDes tahun 2019.

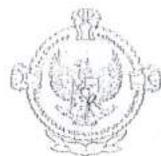
Ternyata di tengah proses verifikasi APBDes untuk pengesahan ke Pemkab Buleleng, ternyata besaran ADD yang didapat bertambah. Total ADD yang dialokasikan untuk 129 desa, kini bertambah menjadi Rp 99,939 miliar, naik hampir Rp 5 miliar. "Ya, karena penambahan itu (ADD), masing-masing

desa kini harus menyesuaikan dulu dalam APBDes. Karena ADD itu berkaitan dengan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, I Made Subur, Selasa (8/1) siang.

Subur mengakui, akibat perubahan karena ada penambahan ADD, masing-masing desa belum bisa mengajukan verifikasi APBDes. Padahal PMD menargetkan, APBDes seluruh desa di tahun 2019,

sudah diverifikasi akhir Desember 2018. Sehingga Januari 2019, tinggal pengamprahan dana untuk mempercepat program kegiatan di seluruh desa. "Kami rasa penyesuaian itu tidak lama, karena program kegiatannya sudah disepakati sebelumnya. Tinggal menyesuaikan Siltap saja. Makanya kami targetkan tanggal 15 Januari nanti, semua desa sudah merampungkan APBDes," kata Subur didampingi Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) I Gusti Mastika.

Sebelumnya, Dinas PMD Buleleng mengingatkan agar 129 desa dapat menuntaskan APBDes 2019, pada Desember 2018. Langkah ini guna mempercepat proses pembangunan di tingkat desa melalui dana-dana pusat, provinsi dan kabupaten. PMD mengaku sudah melakukan pendampingan selama ini kepada seluruh desa dalam penyusunan APBDes 2019. Sehingga tidak ada alasan bagi desa terlambat menyerahkan APBDes 2019. **k19**



Proyek Kabel Tegangan Tinggi di Kuta Selatan

## Pemasangan Dikebut, Target Rampung April

Saat ini progres pengerjaan sudah memasuki 27 persen

MANGUPURA, NusaBali

Proyek pemasangan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) milik PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) I banyak dikeluhkan oleh masyarakat khususnya di wilayah Kuta Selatan, Badung. Pasalnya, proyek tersebut memakan badan jalan yang menyebabkan penyempitan ruas jalur. Walhasil, proyek tersebut kerap memicu kemacetan dan meninggalkan kubangan air.

Nah, atas berbagai keluhan itu, pihak PLN mengaku akan mempercepat proses penggalian dan rencananya rampung pada April 2019 mendatang.

Dikonfirmasi terkait proyek

yang mendapat banyak keluhan masyarakat itu, petugas bagian Teknik JBTB I, Aditya mengakui memang pekerjaan sedikit mengakibatkan kemacetan. Namun tujuan dari proyek tersebut untuk kehandalan sistem kelistrikan Bali khususnya juga di wilayah selatan. Menurut Aditya, kabel bawah tanah dipasang dari kawasan Pecatu, Ungasan, Kutuh, hingga Nusa Dua itu dengan melakukan penggalian sebagian jalan untuk menanam kabel dengan tegangan tinggi. Imbasnya, kerap terjadi kemacetan dan juga adanya kubangan air di beberapa lokasi.

Untuk mengantisipasi hal itu, pihak pelaksana proyek sudah melakukan pengaturan untuk penempatan alat maupun pemasangan rambu serta menerapkan traffic management. "Meski jalur tersebut terjadi kenacetan, namun dengan diberlakukannya sis-

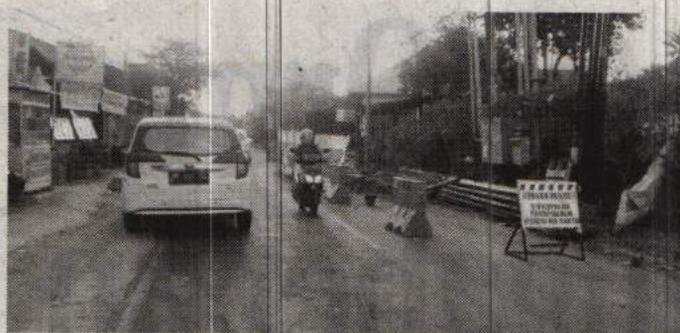
tem buka tutup tentu sedikit membantu memperlancar arus lakulintas. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, proyek ini tentu untuk memperkuat keandalan listrik di Bali dan Kuta Selatan pada khususnya," ungkapnya, Jumat (4/1) siang.

Dirincikannya, untuk pembuatan jalur kabel ini, kata Aditya, pengerjaannya memang dikebut. Saat ini progres pengerjaan sudah memasuki 27 persen. Diharapkan seluruhnya bisa selesai pada bulan Maret atau April 2019. Sementara, untuk mengantisipasi genangan saat musim hujan, pihak pelaksana sudah melakukan antisipasi dengan pemasangan rambu dan juga air genangan akan disedot dan disalurkan ke saluran pembuangan.

Pengerjaan untuk keseluruhan ditarget rampung pada pertengahan tahun 2019. Se-

mentara untuk pembangunan gardu yang di Pecatu sedang dikerjakan dan diharapkan selesai berbarengan. Dengan adanya penambahan gardu di Pecatu, tentu akan ada tambahan daya sebesar 120 MW. Begitu juga untuk di gardu Nusa Dua dan di bandara masing-masing ada tambahan 120 MW. "Kalau untuk saat ini pekerjaannya memang dikebut. Tentunya, diharapkan akan segera selesai dalam waktu dekat, kalau bukan April nanti pertengahan tahun ini," imbuhnya.

Untuk diketahui, bahwa kawasan Badung Selatan seperti Pecatu hingga Nusa Dua, saat ini terus terjadi peningkatan terhadap kebutuhan listrik. Sementara, untuk gardu induk saat ini hanya dilayani dari Nusa Dua saja, sehingga dengan kebutuhan yang terus meningkat serta dengan jarak suplai yang jauh, tentu terjadi



Proyek pengeboran untuk penanaman kabel tegangan tinggi milik PLN di ruas Jalan Darmawangsa, Kuta Selatan, Badung, Jumat (4/1).

kelebihan persentase pembebanan (overblas).

Untuk meningkatkan kehandalan sistem kelistrikan di Bali Selatan, PLN UIP JBTB I mulai melakukan pemasangan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV. Kabel yang dipasang dari kawasan Pecatu hingga Nusa Dua memiliki panjang sekitar 12

Km. Sedangkan dari bandara ke Pecatu total panjangnya adalah 10 km. "Untuk total pekerjaan SKTT 150kV dari Bandara-Pecatu hingga Nusa Dua yaitu sepanjang 22 Km. Nantinya akan dimanfaatkan untuk mensuplay kelistrikan di daerah Pecatu-Nusa Dua dan Bandara," katanya.

Selain itu, sebagai penguat,

juga akan dibangun gardu indoor di dekat kawasan Bali Pecatu Graha (BPG) dengan menerapkan sistem Gas Insulated Switchgear (GIS) atau gardu induk yang menggunakan isolasi Gas.

Diharapkan, dengan tambahan yang ada di Pecatu dan Bandara, untuk suplainya bisa saling mendukung antara gardu di Bandara, Nusa dua dan Pecatu. Hal ini untuk menjaga kehandalan sistem kelistrikan di Badung Selatan. Dengan perumpamaan, apabila ada pemeliharaan di Nusa Dua, untuk pasokan listrik akan didukung sulpay dari Pecatu maupun bandara. Begitu juga sebaliknya, bila ada pemeliharaan di bandara, bisa disuplai dari Pecatu dan Nusa Dua, begitu seterusnya. "Tentunya proyek ini untuk kehandalan sistem kelistrikan di Badung Selatan," tutupnya. **dar**



## Pasca Diberi PR Kenaikan PAD Rp 1 Miliar Lebih **Dishub Tambah Kantong Parkir**



Gede Gunawan AP

**Objek wisata dan pertokoan-pertokoan baru dibidik untuk menambah pendapatan dari sektor parkir. Sementara parkir pinggir jalan dinilai sudah optimal.**

SINGARAJA, NusaBali  
Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng di awal tahun 2019, ber-

encana akan menambah sejumlah kantong parkir. Penambahan tersebut menyusul adanya peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan kepada Dishub Buleleng. Dishub pun mulai memetakan dan melihat potensi kantong parkir yang akan dijajagi untuk ditindak lanjuti.

Kepala Dishub Buleleng, Gede Gunawan AP, Minggu (6/1) kemarin menjelaskan jika peningkatan target PAD dari parkir tahun 2019 ini lebih satu miliar dari tahun 2018 lalu. Jika di tahun 2018 PAD yang disumbangkan Dinas Perhubungan total mencapai Rp 4.051.103.000. Sebanyak Rp 2,9 miliar di antaranya disumbang dari sektor parkir tepi

jalan umum dan parkir khusus. Sehingga di akhir 2019 nanti Dishub Buleleng harus mampu mencapai angka Rp 3,9 miliar dari sektor parkir saja.

"Karena ada peningkatan target tahun ini lebih dari satu miliar dari tahun 2018, kami etul-betul membuat perencanaan yang matang soal perencanaan pelaksanaan parkir, yakni membuat kantong-kantong baru. Sejauh ini memang banyak ada toko dan juga objek wisata yang memiliki potensi, coba akan kami optimalkan di sana," ungkap Gunawan.

Dalam waktu dekat ini pihaknya pun mengaku segera akan menjajaki desa pakraman yang

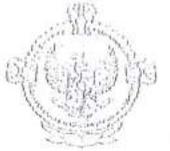
memiliki objek wisata untuk bekerjasama dalam pelaksanaan parkir. Pemetaan tempatnya pun sudah tergambar jelas, hanya saja sejauh ini Gunawan mengaku belum mendapat kajian berapa potensi parkir per hari di wilayah yang dipetakkannya.

Objek wisata dan sejumlah pertokoan baru di Buleleng menjadi target pembukaan kantong parkir baru. Karena sejauh ini pengembangan parkir di Buleleng, hanya bisa dilakukan di parkir khusus. Sedangkan di parkir tepi jalan umum menurut Gunawan sudah maksimal. Kerjasama pelaksanaan parkir khusus dengan desa pakraman itu pun dijelaskan olehnya

akan menggunakan pola bagi hasil 50-50 persen.

Kerjasama itu pun disebut Gunawan, merupakan upaya mengantisipasi adanya pungutan liar. "Karena sesuai Perda menjelaskan, segera urusan tentang parkir diatur sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten Buleleng, yang ditugaskan adalah Dinas Perhubungan. Di luar itu pungli," katanya.

Pihaknya pun mengaku sudah memberikan pemahaman kepada desa pakraman soal hal itu. Bahkan seperti Desa Pakraman Tamblang, Kubutambahan dan Banyupoh sudah bekerjasama sepenuhnya dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan parkir. **k23**



## ✓ Istri Melahirkan, Anggota Dewan Tetap Eksepsi

### ★ Seret Kepala Dinas hingga Rekanan Proyek Biogas Nusa Penida



• NUSABALI/REZA

ANGGOTA DPRD Klungkung, Gede Gita Gunawan, 42 yang menjadi terdakwa korupsi kasus terdakwa di Nusa Penida menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (9/1).

DENPASAR, NusaBali

Anggota DPRD Klungkung, Gede Gita Gunawan, 42 dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), I Made Catur Adnyana, 56, membacakan eksepsi (keberatan atas dakwaan) dalam kasus dugaan korupsi proyek Instalasi Biogas di Nusa Penida, Klungkung di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (9/1). Sementara istri Gita Gunawan, yaitu Thiarta Ningsih, 35 yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini tidak sidang karena melahirkan pada, Selasa (8/1).

Kuasa hukum terdakwa Gita Gunawan, Agus Sujoko mengatakan dalam sidang kali ini hanya Gita Gunawan yang membacakan eksepsinya. Sementara istrinya tidak bisa hadir dalam sidang karena baru saja melahirkan, Selasa (8/1) di RS Bros, Denpasar. Ditanya apakah terdakwa Gita Gunawan sudah sempat melihat anaknya, Agus mengatakan kliennya mendapat ijin menemani saat persalinan.

"Jadi kemarin sudah lihat," ujar pengacara bertubuh tambun ini. Ditambahkannya, untuk eksepsi terdakwa Thiarta akan ditunda sampai terdakwa siap hadir dalam sidang. Sementara itu, dalam eksepsi Gita Gunawan yang dibacakan Agus menyatakan keberatan atas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya.

"Dakwaan jaksa itu terlalu prematur, tidak jelas dan kabur," ujar Agus di hadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukahila. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kuasa hukum terdakwa. Yakni, bahwa dari perencanaan awal bahwa penerima

bantuan biogas yang ditetapkan oleh I Putu Widiada selaku Kepala BPMD-PKBPD adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Energi.

"Sehingga kami di sini menilai bahwa dari awal perencanaan, penetapan kriteria pemberian bantuan untuk instalasi biogas telah keliru. Dan itu dilakukan pihak lain, bukan terdakwa Gede Gita Gunawan," tegasnya.

Kejanggalan lainnya terlihat dalam proses lelang proyek biogas. Sebagai pemenang lelang adalah CV Sari Indah Karya dengan Direktur I Nyoman Suartika. Namun dari pengakuan Suartika, dirinya tidak pernah menandatangani kontrak dan tidak pernah menerima pembayaran kontrak. Jelas jika melihat konteks itu, bahwa proses lelang cacat hukum.

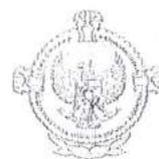
Kemudian pekerjaan biogas itu diserahkan oleh CV Sari Indah Karya

kepada KPA dalam hal itu Made Catur Adnyana. Sedangkan penyerahan proyek bantuan biogas itu kepada masyarakat dilakukan Putu Widiada selaku Kepala BPMDPKBPD Klungkung, di antaranya pada I Made Bhakta, I Nyoman Yasa, I Wayan Rama dll. Nah, berdasarkan fakta itu, jelas bahwa klien kami tidak ada kapasitas dan tidak ada hubungannya dengan proyek biogas tersebut. Sangat naif jika I Gede Gita Gunawan yang notabene adalah anggota dewan, yang tidak punya kapasitas dalam proyek itu, untuk dijadikan terdakwa.

Hal yang sama dinyatakan kuasa hukum terdakwa Made Catur Adnyana yang diwakili Wayan Sumardika. "Kami berharap, majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan jaksa batal demi hukum atau tidak dapat diterima," ujar Sumardika. **rez**

Edisi : Kamis, 10 Januari 2019

Hal : 5



Uang Rp 477,97 Juta Batal Dititipkan di PN

# Dana Ganti Rugi *Shortcut* Jadi Silpa

SINGARAJA, NusaBali

Panitia pembebasan lahan shortcut titik 5-6 di jalur utama Singaraja-Bedugul, urung menitipkan sisa dana ganti rugi di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Dana ganti rugi itu pun kini menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2018.

Sehula panitia berniat menitip dana ganti rugi sebesar Rp 477,97 juta di PN Singaraja sebagai konsinyasi. Penitipan lantaran dana itu belum bisa dibayarkan kepada pemilik lahan seluas 1.515 meterpersegi, atas nama Ferryjanto Satrio.

Ini terjadi karena, bukti kepemilikan masih dijadikan angunan di bank. Di samping itu, dana tersebut harus dicairkan di tahun 2018.

Namun belakangan, dana tersebut batal dititip di PN sebagai konsinyasi. Konon kabarnya, pembatalan itu akibat beda persepsi soal proses penitipan dana tersebut.

Pihak panitia mengira, dana dititip dulu, kemudian ada proses persidangan. Sedangkan pihak PN menyebut, persidangan dulu baru ada proses penitipan dana. Akhirnya pihak panitia terpaksa mengikuti mekanisme yang disampaikan pihak PN.

Kendati demikian, proses persidangan baru dapat dilaksanakan di tahun 2019 sehingga sisa dana ganti rugi itu kini menjadi Silpa karena belum dapat dicairkan di tahun 2018.

Kepala Dinas Pekerjaan



• NUSABALI/SUDIERTA

Ruas badan jalan shortcut titik 5 dan 6 yang sudah mulai terbentuk.

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buleleng, Ketut Suparta Wijaya dikonfirmasi, Minggu (6/1) tidak menampik ada pembatalan penitipan sisa dana ganti rugi pembebasan lahan shortcut titik 5-6, sebesar Rp 477,97 juta di PN Singaraja.

Suparta menyebut, pembatalan itu karena prosesnya harus diawali dengan persidangan dulu. "Memang karena ini menunggu persidangan dulu, sehingga dananya belum bisa dititip. Dananya masih, jadi Silpa," katanya.

Menurut Suparta Wijaya, sambil menunggu proses persidangan, dana ganti rugi tersebut kembali diluncurkan di APBD Induk 2019. Sehingga, ketika persidangan selesai, ada keputusan harus dibayarkan atau dititip, maka dana tersebut tinggal dicairkan.

"Kami sudah alokasikan kembali di APBD Induk 2019, jadi

jumlah dana ganti rugi itu tetap sebesar Rp 477,97 juta. Jadi tinggal menunggu keputusan persidangan saja," terangnya.

Sebelumnya, dalam pembebasan lahan shortcut titik 5-6 di jalur utama Denpasar-Singaraja via Bedugul, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng mencatat luas lahan yang dibebaskan mencapai 10,8 hektare. Lahan tersebut terbagi dalam 30 bidang tanah, dengan jumlah kepemilikan 22 orang. Keseluruhan lahan shortcut yang dibebaskan berada di kawasan Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada.

Proses pelunasan ganti rugi lahan shortcut yang dibebaskan sudah dimulai sejak 6 Desember 2018 lalu. Masing-masing pemilik lahan pun telah menunjukkan bukti kepemilikan, hingga nilai ganti rugi disepakati. Bahkan, salah satu keluarga pemilik lahan yang

tadinya ngotot ingin lahannya ditukar guling, telah memilih dana ganti rugi.

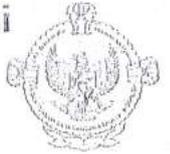
Dalam pelunasan ganti rugi lahan shortcut tersebut juga disertai dengan pelepasan hak kepemilikan, sehingga tanahnya kini menjadi aset pemerintah. Namun, ada salah satu bidang lahan milik keluarga Ferryjanto Satrio, dengan luas 1.515 meter persegi dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 477.965.023 atau Rp 477,97 juta, belum bisa dibayarkan.

Shortcut titik 5-6 dirancang sepanjang 1,9 kilometer, dengan lebar badan jalan 9 meter untuk dua jalur. Nantinya, ada jembatan sepanjang 210 meter dalam shortcut dengan jumlah 5 tikungan dan kemiringan maksimal 6 derajat ini. Titik 5 shortcut berada di Kilometer 57 wilayah Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Buleleng, tepatnya depan Pura Yeh Ketipat ke arah timur menuju Desa Pegayaman. Sedangkan titik 6 shortcut berada di kilometer 59 perbatasan Desa Wanagiri-Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada.

Waktu tempuh di atas shortcut titik 5-6 sepanjang 1,9 kilometer ini hanya 3 menit, dengan kecepatan 40-60 kilometer per jam. Pembangunan shortcut titik 5-6 ini sepenuhnya dibiayai dari APBN, dengan nilai kontrak sebesar Rp 140.684.958.700 atau Rp 140,69 miliar, yang dikerjakan PT ADHI-Cipta KSO. Shortcut titik 5-6 ditargetkan sudah rampung per 31 Desember 2019 mendatang. **k19**

Edisi : Senin, 7 Januari 2019

Hal : 4



## Perusda Lanjut, Dirut Dipertahankan

### Pemkab Akan Suport Modal, Regulasi dan Usaha Baru

Geruduk Dinas, Eks Pegawai Akan Dipekerjakan Kembali

**NEGARA** - Sekda Jembrana I Made Sudiada memenuhi janjinya untuk menyelesaikan problem yang tengah membelit Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana. Sesuai perintah Bupati I Putu Artha, Rabu kemarin (9/1), Sudiada bersama Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (PMPTSP dan Naker) Jembrana Ni Nengah Wartini dan Direktur Perusda Jembrana I Gusti Kade Kusuma Wijaya serta pengawas, mengadakan rapat membahas mengenai Perusda Jembrana, terkait kebangkrutan dan pemberhentian pegawai.

Ni Nengah Wartini

dikonfirmasi usai rapat mengatakan, berdasarkan hasil rapat, diputuskan bahwa pegawai yang sudah *nonjob*-kan akan dipekerjakan lagi jika unit usaha perusda sudah siap. Karena saat ini masih proses mencari usaha lagi, sehingga pegawai sementara dirumahkan. "Intinya, mereka belum di-PHK sebenarnya," ujarnya.

Inti dalam rapat kemarin, Perusda Jembrana tetap akan dipertahankan dan akan diambil langkah-langkah oleh pemerintah untuk *support* agar Perusda Jembrana tetap jalan. Langkah yang akan diambil antaranya, bantuan sarana, modal, sehingga bisa beroperasi lagi.

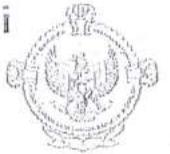
Upaya untuk menyelamatkan perusda tersebut, pemerintah kabupaten Jembrana akan *mem-backup* penuh usah-usah yang dilakukan, misalnya membutuhkan regulasi, akan dibuat regulasi secepatnya. "Perusda ditekankan untuk

mencari terobosan untuk keberlangsungan Perusda," terangnya.

Sementara itu, saat bersamaan dengan rapat yang dipimpin Sekda, mantan pegawai Perusda Jembrana yang diberhentikan kemarin juga menggeruduk Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Jembrana. Sebanyak tujuh orang yang datang untuk mengadukan sejumlah masalah yang mereka hadapi.

Tujuh orang mantan pegawai perusda tersebut menyampaikan tiga tuntutan.



**Radar Bali**

(sambungan)

pegawai yang notabene adalah aset Perusda Jembrana. "Kami minta masalah ini segera diselesaikan," kata Yunita Prihatini, salah seorang pegawai yang dinonjobkan.

Senada disampaikan Putu Gede Yuniarta. Mewakili pegawai lain, dia meminta pemerintah kabupaten Jembrana selaku pemilik perusahaan untuk bertanggungjawab. Serta meminta keadilan mengenai gaji yang belum dibayarkan dan pemberhentian sepihak yang telah dilakukan direkur. "Kami sudah bekerja sepuluh tahun lebih, justru diperlakukan seperti ini," terangnya.

Di antaranya, meminta kepastian status pegawai setelah diberhentikan, kedua meminta kepastian gaji yang tidak dibayar selama delapan bulan pada tahun 2018 dan terakhir meminta pemerintah kabupaten Jembrana untuk bertanggungjawab pada

Dalam kesempatan itu, semua pegawai sepakat untuk meminta pemerintah kabupaten Jembrana melakukan audit. Bahkan, secara tegas mereka meminta pemerintah untuk memberhentikan Direktur Perusda Jembrana karena dinilai tidak bisa menjalankan

perusahaan. "Direktur harus bertanggungjawab kalau tidak mau memajukan perusahaan, mundur saja. Kinerjanya tidak becus, lebih baik mundur," tegas mantan pegawai yang lain.

Di samping itu, mantan pegawai mencurigai ada penyelewengan pendapatan Perusda Jembrana. Misalnya, untuk usaha sedot WC yang sebelumnya selalu tembus target Rp 18 juta dalam sebulan, lambat laun menurun. Bahkan beberapa bulan terakhir pendapatan yang masuk kepada keuangan hanya Rp 900 ribu.

Kadis PMPTSP dan Naker Jembrana Ni Nengah Wartini dikonfirmasi membenarkan pengaduan yang disampaikan mantan pegawai mengenai Perusda Jembrana mengenai status nonjob dan menuntut gaji yang belum dibayar. "Semua yang disampaikan mereka (mantan pegawai perusda), sudah kami bahas dirapat," jelasnya. **(bas/han)**

**Hasil Rapat Pemkab-Dirut Perusda**

Pegawai yang dinonjob-kan akan dipekerjakan lagi jika unit usaha perusda sudah siap.  
Mempertahankan Direktur Perusda I Gusti Kade Kusuma Wijaya  
Karena saat ini masih proses mencari usaha baru, pegawai sementara dirumahkan.  
Perusda Jembrana tetap akan dipertahankan dan

akan diambil langkah-langkah oleh pemerintah untuk men-support agar Perusda Jembrana tetap jalan.  
Langkah yang akan diambil antaranya, bantuan sarana, modal, sehingga bisa beroperasi lagi.  
Pemkab Jembrana akan mem-backup penuh usaha-usaha yang dilakukan. misalnya membutuhkan regulasi, akan dibuat regulasi secepatnya.

**Tuntutan Pegawai Dirumahkan:**

Meminta kepastian status setelah diberhentikan  
Meminta kepastian gaji yang tidak dibayar selama delapan bulan pada tahun 2018  
Meminta Pemkab Jembrana untuk bertanggungjawab kepada pegawai yang notabene adalah aset Perusda Jembrana.  
Meminta Pemkab Jembrana melakukan audit Perusda

Meminta Pemkab memberhentikan Direktur Perusda Jembrana  
Pegawai mencurigai ada penyelewengan pendapatan Perusda Jembrana. Misalnya, untuk usaha sedot WC yang sebelumnya selalu tembus target Rp 18 juta dalam sebulan, lambat laun menurun. Bahkan beberapa bulan terakhir pendapatan yang masuk kepada keuangan hanya Rp 900 ribu.

Edisi : Kamis, 10 Januari 2019

Hal. : \_\_\_\_\_



## 8 Jaksa untuk 2 Tersangka Korupsi



DILIMPALKAN: Klian Banjar Sarikuning Tulungagung Desa Tukadaya I Dewa Ketut Artawan (dua dari kiri) dan Klian Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya I Gede Astawa (tiga dari kiri) di Kejaksaan Jembrana, kemarin.

### Kasus Santunan Kematian Fiktif

NEGARA - Penyidik Satrikrim Polres Jembrana melimpahkan tersangka dan berkas serta barang bukti kasus korupsi santunan kematian kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Kamis kemarin (24/1). Dua tersangka yang dilimpahkan tetap menjalani penahanan di rumah tahanan (Rutan) Kelas IIB Negara.

Dua tersangka tersebut, adalah kepala kewilayahan atau klian banjar dari Desa Tukadaya Kecamatan Melaya. Di antaranya dari Banjar Sarikuning Tulungagung I Dewa Ketut Artawan dan Banjar Munduk Ranti Tukadaya I Gede Astawa. Keduanya ditetapkan tersangka kasus korupsi karena terlibat dalam pengajuan santunan kematian fiktif ke Dinas Sosial Jembrana.

Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi dan pasal 3 UU pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan ancaman

hukuman paling singkat 4 tahun penjara. "Penahanan melanjutkan penahanan Polres (Jembrana)," kata Kasipidsus Kejari Jembrana

Ivan Praditya Putra.

Setelah menerima pelimpahan tersebut, pihaknya akan melimpahkan pada pengadilan tindak pidana

korupsi (Tipikor) Denpasar, untuk mendapat jadwal sidang. Tim jaksa penuntut umum (JPU) yang akan menjadi penuntut dua tersangka, sebanyak

delapan orang jaksa. Beberapa

Edisi : Jumat, 25 Januari 2019

Hal. : 7



## Radar Bali

(Sambungan)

diantaranya, jaksa yang menjabat kepala seksi di Kejari Jembrana. "Tim jaksa delapan orang," imbuhnya.

Kasus korupsi santunan kematian tersebut selain menyeret kepala kewilayahan atau klian banjar dan salah seorang PNS, Indah Suryaningsih. Indah sudah divonis bersalah dan diganjar dengan 4 tahun pidana penjara. Hakim juga membebaskan terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 171 juta, namun jaksa masih banding karena denda tidak sesuai dengan tuntutan jaksa menuntut terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 239 juta.

Kasus korupsi ini juga diduga melibatkan klian dan perangkat desa lain. Karena dari hasil penyelidikan, terungkap aliran uang santunan kematian fiktif diantaranya kepada Kepala Lingkungan Asih Gilimanuk Tumari mendapatkan Rp 18.600.000; Kepala Lingkungan Asri Gilimanuk

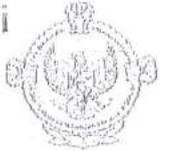
Ni Luh Sridani Rp 29.000.000; Kepala Lingkungan Jineng Agung Gilimanuk I Komang Budiarta menerima uang Rp 7.700.000.

Kepala Kewilayahan Banjar Sarikuning Tulungagung I Dewa Ketut Artawan menerima Rp 75.800.000; Kepala Kewilayahan Banjar Munduk Rani Tukadaya I Gede Astawa menerima uang Rp 32.000.000; kaur pemerintahan Desa Baluk I Gede Budhiarsa menerima uang Rp 4.200.000. Selain kepala kewilayahan dan kaur tersebut, satu orang lagi juga menerima uang sebesar Rp 400.000, bernama Saniyah saat itu sebagai PKK.

Sejumlah orang yang menerima uang hasil korupsi santunan kematian fiktif tersebut sudah mengembalikan uang sebelum dilakukan penyelidikan oleh polisi, sehingga bisa lolos dari jeratan hukum. Sementara Indah Suryaningsih, dua klian tidak mengembalikan uang hingga polisi melakukan penyelidikan. (bas/han)

Edisi : Jumat, 25 Januari 2019

Hal. : 7



## JAMINAN SOSIAL



ADRIAN SUWANTORADAR BALI

**PERIKSA:** Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra saat menghadiri acara pemeriksaan kesehatan untuk lansia di Denpasar beberapa waktu lalu.

### Santunan Lansia Naik Jadi Rp500 Ribu

DENPASAR - Progam Pemkot Denpasar berupa santunan bagi orang lanjut usia (Lansia) telantar pada tahun 2019 ini ditingkatkan nominalnya menjadi Rp500 ribu per bulan. Pada tahun 2018 santunan tersebut hanya sebesar Rp 200 ribu. Dengan demikian, naik Rp300 ribu per bulan.

Para lansia penerima santunan ini dapat mempergunakan uang tersebut sesuai kebutuhan mereka. Tercatat pada tahun 2018 yang mendapatkan santunan dari pemerintah sebanyak 316 orang dengan kriteria minimal berumur 60 tahun dan lansia telantar.

"Tahun ini kebijakan Wali Kota Rai Mantra dan Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara meningkatkan penerimaan santunan lansia yang telah menganggarkan Rp500 ribu per bulan," ujar Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Made Mertajaya yang ditemui Kamis (10/1) di Rumah Berdaya Denpasar.

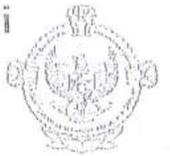
Dikatakan, peningkatan ini melihat dari kebutuhan hingga membantu dalam segi kesehatan. Dinas Sosial memprioritaskan bagi para lansia terlantar dan diharapkan dapat membantu meningkatkan dari segi kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. "Tahun ini kami telah mendata kembali lansia di Kota Denpasar dengan jumlah penerima 259 orang," ujarnya.

Ia menjelaskan, lansia yang mendapatkan santunan telah tutup usia otomatis santunan ini tidak dapat diterima lagi dengan menyetorkan akta kematian serta akan mendapatkan santunan kematian dengan besaran Rp1 juta. Santunan kematian ini tentu dengan jumlah yang sama seperti masyarakat umum lainnya yang mewajibkan menyetorkan akta kematian yang telah berlaku secara daring (dalam jaringan/ online) dari desa/ kelurahan.

Di samping itu program lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan lansia juga memfasilitasi kegiatan posyandu paripurna hingga memperingati hari lansia dengan berbagai kegiatan produktif. Peningkatan kegiatan ini juga bersinergi dengan instansi terkait Pemkot Denpasar. Hingga program bagi para lansia telantar juga melibatkan peran serta perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). (feb/yor)

Edisi : Jum'at 11 - 1 - 2019.

Hal. : 4.



## Sekda Klaim Masalah Perusda Selesai

### Soal Penyertaan Modal Tunggu Persetujuan Dewan

Hal 5, 11 Januari 2019

NEGARA - Keputusan hasil rapat pemerintah kabupaten Jembrana dengan Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana, mengenai krisis dan keberlangsungan perusda dinilai sudah akhir dari masalah yang selama ini dialami Perusda Jembrana. Karena itu, diharapkan pengelolaan Perusda Jembrana semakin baik lagi.

Dengan hasil rapat yang telah diputuskan, Perusda Jembrana diharapkan membuka lembaran baru dengan pengelolaan lebih baik. Karena pemerintah kabupaten Jembrana selaku pemilik perusahaan sudah menjamin akan keberlangsungan Perusda. Salah satunya membuat regulasi yang dibutuhkan dan mendukung unit usahanya. "Perusda sudah selesai (masalahnya)," kata Sekretaris daerah (Sekda) Jembrana I

Made Sudiada, kemarin.

Sekda memastikan semua tuntutan pegawai, mulia dari kepastian status nonjob sudah selesai. Karena pegawai yang telah menerima surat nonjob, nantinya akan dipekerjakan lagi di Perusda Jembrana.

Namun, ditanya mengenai penyertaan modal untuk Perusda Jembrana dari pemerintah, Sekda menyebut dalam keputusan rapat memang membahas masalah penyertaan modal. Akan tetapi, kepastian penyerahan penyertaan modal belum bisa diputuskan karena harus menunggu persetujuan dewan. "Tidak bisa diputuskan sendiri, harus ada persetujuan dewan," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Perusda Jembrana bangkrut karena tidak ada usaha yang bisa menghasilkan pendapatan besar. Hanya ada usaha percetakan dan sedot WC. Dengan usaha tersebut tidak ada cukup untuk membayar gaji pegawai, akhirnya sebanyak 10 pegawai dinonjobkan

sedangkan yang lain mengundurkan diri.

Perusda Jembrana juga tidak membayar gaji pegawai selama delapan bulan tahun 2018 lalu, dengan nilai total sebesar Rp 300 juta lebih. Akhirnya, setelah masalah ini mencuat, pemerintah kabupaten Jembrana memutuskan bahwa pegawai yang sudah *nonjob*-kan akan dipekerjakan lagi jika unit usaha perusda sudah siap. Karena saat ini masih proses mencari usaha lagi, sehingga pegawai sementara dirumahkan.

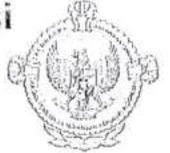
Perusda Jembrana tetap akan dipertahankan dan akan diambil langkah-langkah oleh pemerintah untuk *men-support* agar Perusda Jembrana tetap jalan. Langkah yang akan diambil antaranya,

bantuan sarana, modal, sehingga bisa beroperasi lagi.

Upaya untuk menyelamatkan perusda tersebut, pemerintah kabupaten Jembrana akan *mem-backup* penuh usah-usaha yang dilakukan. Misalnya membutuhkan regulasi, akan dibuat regulasi secepatnya. "Perusda ditekankan untuk mencari terobosan untuk keberlangsungan Perusda," terangnya. (bas/han)

Edisi : Jumat, 11 Januari 2019

Hal. : 5



# Badung Defisit APBD Rp 700 Miliar Lebih

## Buntut Melesetnya Target Pendapatan

**MANGUPURA** - Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Badung mengalami defisit Rp 700 miliar. Penyebabnya, target pendapatan Badung di tahun 2018 ini meleset. Dampaknya, banyak proyek yang molor dan bahkan penundaan dalam pembayaran. Selain itu, bantuan hibah juga banyak yang tidak cair.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan, target pajak pada APBD induk 2018 terpasang Rp 4,9 triliun lebih. Kemudian pada APBD Perubahan dikoreksi menjadi Rp 4,1 triliun lebih. Ada 10 jenis pajak yang ditarik Bapenda Badung, yaitu pajak hotel, restaurant, parkir, hiburan, penerangan jalan, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, reklame, PBB dan BPHTB. Dari 10 jenis pajak tersebut seluruhnya tidak mencapai target.

Misalnya, pajak hotel yang ditargetkan sebesar Rp 3,8 triliun lebih, pajak restaurant yang di target Rp 645,7 miliar, terealisasi Rp 594,2 miliar lebih, selanjutnya pajak hiburan yang ditargetkan Rp 75,7 miliar terealisasi Rp 70,9 miliar lebih. Pajak reklame realisasinya paling kecil, yakni dari target Rp 14 miliar, baru terealisasi Rp 2,3 miliar lebih.

Realisasi pendapatan pajak sebesar Rp 3,8 triliun lebih. Sementara penerimaan sisa lebih penggunaan anggaran di tahun 2017 sebesar Rp 676 miliar lebih. Dana Silpa ini juga untuk memenuhi kekurangan APBD 2018 tetapi masih tetap saja mengalami defisit. "Dari target Rp 4,1 miliar, per 20

Desember lalu sudah tercapai Rp 3,8 miliar lebih," Kepala Badan Pendapatan / Pasedahan Agung Kabupaten Badung I Made Sutarna belum lama ini.

Dalihnya, kondisi pariwisata Bali yang mengalami banyak gangguan. Terutama pemulihan pasca erupsi Gunung Agung yang memicu turunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada awal tahun 2018. Selain itu, adanya gangguan keamanan seperti isu bom oleh kelompok terorisme, bencana gempa bumi di Lombok dan isu penyebaran penyakit rabies dan *Japanese encephalitis* turut mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Bali, isu mafia Tiongkok dan lainnya. Para peserta IMF-Bank Dunia di Nusa Dua beberapa waktu lalu tak dikenakan pajak hotel. "Penurunan jumlah kunjungan wisatawan berdampak langsung pada penurunan penerimaan realisasi pajak daerah," terang Birokrat asal Desa Pecatu tersebut.

Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, Ketut Gede Suyasa, mengakui pendapatan meleset. Karena dari target pendapatan sudah termasuk pajak dan dana transfer totalnya mencapai Rp 7,5 triliun lebih. "Hanya terealisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp 5,2 triliun atau hanya mencapai 69, 74 persen," ungkapnya dikonfirmasi terpisah, Jumat (11/1).

Kontan pendapatan tidak terpenuhi berpengaruh terhadap APBD Badung. Bahkan untuk tahun 2018 ini, APBD Badung mengalami defisit anggaran ratusan miliar rupiah. "Per 31 Desember 2018 (defisit) sekitar Rp 700 miliar," jelas Gede Suyasa. (dwi/rid)

Edisi : Sabtu, 12 Januari 2019

Hal. : 11



## Radar Bali

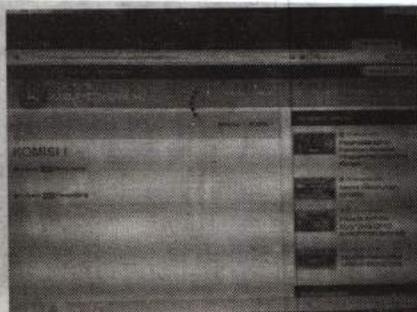
Mengintip Website OPD di Pemkab Badung yang Masih Digarap Asal-asalan

### Banyak Tak Update, Anggota Komisi di DPRD pun Tak Ada

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung telah melaunching Badung Command Center (BCC) belum lama ini. BCC ini sebagai pusat komando dan juga data center dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) se-Badung. Sayangnya, masih banyak website OPD yang digarap asal-asalan.

**WEBSITE** Pemkab Badung itu beralamat di [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id). Di dalam website ini, sedikitnya ada 72 subdomain dari organisasi perangkat daerah di Pemkab Badung. Dari kecamatan, kantor, dinas dan badan. Dari pantauan Koran ini, ternyata masih banyak data yang dibutuhkan tapi belum tersedia, sehingga perlu diupdate ulang.

Sebagai contoh saja, website di Dinas



MADE DWIJA PUTRA/RADAR BALI

**BELUM TERISI:** Nama-nama anggota Komisi DPRD Badung sama sekali belum terisi alias kosong di website sekretariat DPRD Badung hingga kemarin.

Kesehatan Badung belum berisi jumlah Puskesmas di Badung, nama kepala Puskesmas, berapa ada dokter dan perawat, dan lain sebagainya. Begitu juga website Sekretariat DPRD Badung juga sama. Nama-nama anggota Komisi dari I sampai IV juga sama sekali tidak terisi. Padahal, anggota DPRD Badung

periode ini sudah memasuki masa bhakti empat tahun, bahkan sebentar lagi Pemilu. Secara umum, konten di masing-masing OPD ini kurang update, baik berita atau informasi lainnya, juga miskin konten.

Kepala Dinas Kominfo Badung Badung I Wayan Weda Dharmaja tak menampik kondisi ini. Untuk itu pihaknya meminta agar semua perangkat daerah dapat mengisi data sesuai dengan tupoksinya dalam konten yang tersedia. "Sehingga masyarakat luas dapat mengakses data yang diperlukan seperti jumlah penduduk di Badung, tempat wisata dan sebagainya," terangnya.

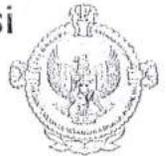
Bila data-data ini sudah terkumpul, maka pihaknya memastikan seluruh data terintegrasi semua. Masyarakat pun dapat dengan mudah mengakses. "Tujuan awal memang seperti itu bagaimana supaya seluruh data dapat terintegrasi. Mengenai hal ini sebetulnya telah

kita bahas dalam rapat konsolidasi beberapa waktu lalu. Bapak Wakil Bupati juga hadir langsung waktu itu," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Badung juga telah membangun Badung Command Center (BCC) sebagai pusat terintegrasinya semua data dari OPD di Kabupaten Badung. BCC ini juga merupakan pusat akses data serta pusat penyediaan informasi yang mudah dijangkau, akurat, efektif, real-time, timely based terkait program Smart City di Kabupaten Badung. "Visi dari Smart City Kabupaten Badung ini didasari oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah dan efisiensi kebijakan publik, dengan tetap mempertahankan seni budaya Bali yang berdasarkan Tri Hita Karana," terang Weda Dharmaja, Jumat (11/1).  
**(made dwija putra/yor)**

Edisi : Sabtu, 12 Januari 2019

Hal. : 4



## Radar Bali

Sambungan

# Anggaran Dari Hasil Bagi Pajak

### ■ DUMDUMAN...

*Sambungan dari hal 1*

"Anggarannya itu dari masing-masing desa. Mobil itu nanti untuk operasional di desa," ujarnya, Jumat kemarin (11/1).

Untuk anggarannya, nanti masing-masing desa yang menanggung. Anggaran diperoleh dari Bagi Hasil Pajak (BAP) Kabupaten Gianyar. Total dana BAP untuk seluruh desa di Kabupaten Gianyar pada 2019 ini, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. "Tahun 2018 bagi hasil pajak itu Rp 53 miliar. Menjadi Rp 72 miliar lebih. Jadi jumlah itu naik sekitar Rp 19 miliar," jelasnya.

Kata dia, seluruh BAP yang mencapai Rp 72 miliar lebih telah dibagi ke masing-masing desa di Kabupaten Gianyar. Sesuai dengan perhitungan, berdasarkan kebutuhan, letak geografis, jumlah penduduk miskin, maka setiap desa menerima BAP dalam jumlah berbeda. Namun angkanya

mencapai Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar lebih.

Mengenai anggaran mencapai Rp 250 juta, pihaknya belum tahu pasti. "Tentunya nanti akan dirapatkan dalam forum untuk dicari tipe mobil yang harganya di bawah itu, pastinya Xpander itu ada tipenya," jelasnya.

Pengadaan mobil operasional untuk seluruh desa di Kabupaten Gianyar ini memang menjadi kebijakan Bupati Mahayastra. Harapannya agar setiap desa memiliki kendaraan operasional untuk mendukung Gianyar sebagai Kota Layak Anak dan Desa Siaga. "Nanti proses pengadaan barang menggunakan e-katalog, lewat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan. Itu dianggarkan di masing masing desa," terangnya.

Selanjutnya mobil ini akan menjadi aset desa, dengan memakai plat merah. Dan plat nomor polisi itu akan ditentukan berdasarkan SK Bupati.

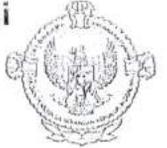
"SK sudah dibuatkan no kode 401 KT, misal 404 KT itu pasti mobil operasional desa di Gianyar yang punya, jadi biar langsung menjadi aset desa," imbuhnya.

Subayasa menegaskan, bahwa mobil Xpander itu nantinya bukan kendaraan bagi perbeker. Melainkan untuk mendukung operasional di desa. Sehingga memudahkan untuk mobilitas setiap kegiatan di desa. "Nanti mobil itu bisa dimanfaatkan masyarakat, misal untuk mendak Pedanda, karena selama ini di desa misalnya mengantar peserta lomba itu pasti pakai mobil pribadi, makanya disiapkan mobil ini," pungkasnya.

Sementara itu, ketua forum perbeker dan lurah se-kabupaten Gianyar, Gusti Ngurah Susila, yang juga perbeker Bona, belum bisa menanggapi mengenai mobil Xpander itu. Pesan whatsapp, pesan singkat hingga sambungan telepon koran ini belum ditanggapi. (dra/rid)

Edisi : \_\_\_\_\_

Hal. : \_\_\_\_\_



# Radar Bali

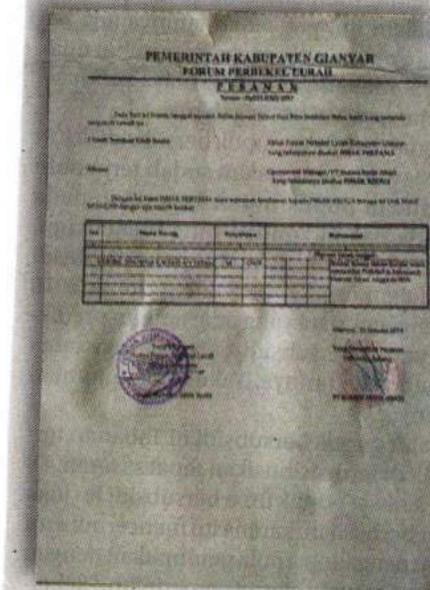
## Dumduman Xpander Perbekel Se-Gianyar

### Sudah Dipesan, Nilainya Ratusan Juta Per Unit

**GIANYAR** - Sebanyak 64 perbekel dan lurah di Kabupaten Gianyar sebentar lagi akan mendapat mobil Mitsubishi Xpander Exceed A/T warna hitam. Melalui sepucuk surat, mobil itu sudah dipesan oleh Forum Perbekel se-Kabupaten Gianyar kepada PT Bumen Radja Abadi. Setiap desa yang memesan mobil ini sudah harus menyiapkan anggaran masing-masing Rp 250 juta.

Sekda Kabupaten Gianyar Made Gede Wisnu Wijaya didampingi Kabid Bina Pemerintahan Desa Wayan Gede Subayasa mengakui forum perbekel dan lurah memesan Xpander. Mobil itu nantinya akan menjadi operasional bagi desa setempat ■

► *Baca Dumduman... Hal 11*

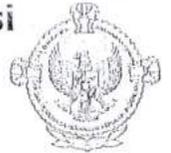


**ORDER:**  
Surat  
permintaan  
mobil  
Mitsubishi  
Expander  
dari ketua  
Forum  
Perbekel/  
Lurah  
seluruh  
Gianyar  
kepada  
perusahaan  
mobil.

ISTIMEWA

Edisi : Sabtu, 12 Januari 2019

Hal. : 11



# Pabrik Limbah Medis Pulukan

## Belum Jelas

**NEGARA** - Rencana pembangunan pabrik limbah medis di desa Pulukan, Pekutatan, masih belum jelas. Sebab, hingga kini belum ada kesepakatan antara investor yang akan mendirikan pabrik limbah medis dengan masyarakat untuk sewa tanah wakaf untuk lokasi pabrik.

Sebelumnya pihak investor memang melirik tanah wakaf milik warga Muslim itu untuk lokasi pabrik. Tanah wakaf yang rencananya akan disewa investor ini berada di pinggir sungai dengan kondisi bertebing, serta jalan yang belum bagus. Informasinya tidak semua masyarakat muslim di Pulukan setuju dengan rencana penyewaan tanah wakaf ini jika digunakan sebagai pabrik untuk mengolah limbah berbahaya seperti limbah medis.

Sampai saat ini pembicaraan lanjutan sewa-menyewa tanah wakaf itu belum ada, sehingga kapan pabrik dibangun juga belum jelas. "Untuk penyewaan tanah wakaf itu masih belum ada pembicaraan final dengan investor yang akan membangun pabrik itu," ujar Ketua Nadzir Wakaf Pulukan Suryanto, Rabu lalu (9/1). Menurutnya, untuk mencari lokasi pabrik, investor datang ke kantor desa menyampaikan maksudnya yang akhirnya mendatangi tiga lokasi lahan termasuk tanah wakaf. "Selain tanah wakaf ada dua lokasi lahan yang juga dilihat investor. Lahan wakaf kami di lokasi itu sekitar lima



hektare dan rencananya akan disewa sekitar tiga puluh are," ungkapnya. Karena tanah wakaf milik semua masyarakat muslim di Desa Pulukan, maka dalam pengambilan keputusan juga harus melibatkan masyarakat, termasuk lembaga yang mengurus wakaf di kabupaten.

Sementara Sunardi, salah seorang takmir masjid Desa Pulukan yang juga sebagai Kepala Dusun Pulukan mengatakan, proses penyewaan

tanah wakaf itu masih panjang karena harus melewati beberapa proses sebelum pengambilan keputusan. Perbekel Pulukan I Wayan Armawa menambahkan, rencana pendirian pabrik pengolahan limbah medis itu masih sebatas wacana dari investor dan belum ada kesepakatan final. **(nom/han)**

**TUNGGU PROSES:** Tanah wakaf di Desa Pulukan, Pekutatan yang akan jadi lokasi pabrik limbah medis.

Edisi : Sabtu, 12 Januari 2019

Hal. : 5



## Radar Bali

### Badung Ngutang Proyek Rp 300 Miliar

**MANGUPURA** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menyisakan sejumlah proyek tertunda alias molor. Ada proyek molor karena ulah rekanan yang terlambat dan juga ada proyek pembayarannya tertunda alias ngutang. Pemkab Badung dikabarkan menunggak sekitar Rp 300 miliar dari 24 proyek fisik. Kontan pembayaran tunggakan proyek ini harus dilunasi di tahun 2019.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, Ida Bagus Surya Suamba mengakui ada puluhan proyek yang belum dibayarkan oleh Pemkab Badung. Kontan ini menjadi wanprestasi Pemkab Badung karena tidak menunaikan kewajiban kepada rekanan. "Kalau

tidak salah sekitar Rp 300 miliar dari total proyek. Seperti proyek Ring River, Pasar Blahkiuh, pematangan lahan SMA Abiasemal," jelas Surya Suamba dikonfirmasi, Selasa (8/1).

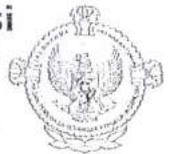
Kata dia, keterlambatan pengerjaan proyek akibat dari kekurangan pembayaran pemerintah memberikan kompensasi atau perpanjangan pengerjaan proyek. Pihak rekanan juga menunggu kabar baik dari Pemkab Badung terkait pelunasan sisa tunggakan yang belum dibayarkan. "Karena belum dibayar rekanan minta kompensasi dan berharap segera dilakukan pembayaran. Soal itu silakan konfirmasi ke bapak Sekda" jelasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Wayan Adi Arnawa berjanji

akan segera melunasi tunggakan yang belum dibayarkan. "Kami berterimakasih, karena pihak rekanan mau mengerti kondisi kami, dan tentunya kami akan segera membayar sisa yang belum terbayarkan," ujar Sekda asal Pecatu, Kuta Selatan ini.

Ia menegaskan kembali akan segera melunasi semua sisa tunggakan proyek selama setahun anggaran. Pemkab Badung juga akan memberikan bunga atas tunggakan yang belum terbayarkan kepada rekanan. "Ini menjadi prioritas kami, kalau tidak ada hal yang urgent tentunya pembayaran akan difokuskan kesini (tunggakan proyek). Sesuai aturan kami berikan bunga kalau tidak salah 12 persen per tahun," pungkasnya. (dwi/rid)

Edisi : Rabu, 9 Januari 2019  
Hal. : 7



## **DAK Rp 4,5 Miliar untuk Perbaikan 39 Sekolah Dasar**

**TABANAN** - Dinas Pendidikan Tabanan bisa bernafas lega setelah mendapatkan gelontoran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp 4,5 miliar lebih. Dana DAK tersebut diperuntukan untuk perbaikan ruang kelas, jamban siswa dan pengadaan buku pada perpustakaan sekolah.

Kabid Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Tabanan I Wayan Sukanitra mengakui banyak bangunan sekolah dasar (SD) di Tabanan yang rusak dan perlu mendapatkan penanganan. Nah karena keterbatasan anggaran di daerah, Pemkab Tabanan mengajukan permohonan dana ke pusat. "Saat ini Disdik Tabanan telah mendapat kucuran DAK sebesar Rp 4,5 miliar lebih. DAK tersebut naik sebesar Rp 500 juta dibanding tahun 2018 lalu yang hanya sebesar Rp 4 miliar," ujar Sukanitra kemarin (8/1).

DAK tersebut akan digunakan perbaikan ruangan belajar (kelas), perbaikan toilet siswa, pengadaan buku perpustakaan sekolah dan juga pembangunan ruang kelas baru di SD 1 Dajan Peken, Tabanan. Total sebanyak 39 SD di Tabanan akan dilakukan rehab, 7 SD dilakukan perbaikan ruangan kelas dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat. DAK yang dibutuhkan sebesar Rp 2,7 miliar lebih.

Sementara 11 SD akan dilakukan perbaikan toilet (jamban) siswa yang mengalami kerusakan sedang dan berat dengan anggaran DAK Rp 166 juta lebih. Kemudian ada satu sekolah dilakukan pembangunan gedung baru SD 1 Dajan Peken anggaran sebesar Rp 645 juta lebih. Dan untuk pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah ada 20 SD yang mendapatkan dengan anggaran Rp 1 miliar. "Secara keseluruhan DAK pusat lebih banyak diperuntukan untuk perbaikan kebutuhan fisik sekolah. Termasuk SD yang mengalami kerusakan gempa beberapa waktu lalu," tandasnya. (uli/dot)

Edisi : Rabu, 9 Januari 2019

Hal. : 2



## Nasib Dirut Perusda di Tangan Bupati

### Usai Diklarifikasi Dinas, Akan Dipanggil Dewan

**NEGARA** - Kisruh di tubuh Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana, berlanjut. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSP dan Naker) Jembrana, akhirnya turun untuk mendalami masalah pemberhentian pegawai Perusda Jembrana, pada Senin kemarin (7/1). Dinas mengklarifikasi keputusan Direktur Perusda Jembrana yang memutuskan memberhentikan pegawainya.

Hasil klarifikasi, Direktur Perusda Jembrana membenarkan memberhentikan pegawai. Artinya, pegawai sudah tidak ada pekerjaan lagi dan tidak

dapat gaji. Namun, pegawai masih bisa "bekerja" ke kantor perusda untuk rapat membahas masalah perusda, serta program ke depan. "Memang ada nobjob itu pada pegawai," terang Kadis PMPTSP dan Naker Jembrana Ni Nengah Wartini, usai klarifikasi.

Dalam aturan ketenagakerjaan, memang tidak ada istilah nonjob untuk pegawai perusahaan yang sudah tidak ada usaha dan tidak memberikan mereka gaji. Namun, keputusan nonjob tersebut sudah disetujui oleh pengawas. "Hasil klarifikasi masih perlu kaji dulu," ujar Wartini.

Di samping itu, pihaknya masih menunggu hasil pembahasan dari dewan pengawas dan pemilik perusahaan, dalam hal ini pemerintah kabupaten Jembrana. "Kami juga menunggu dari pengawas dan



FOTO-FOTO: M. BASIR/RADAR BALI

**DIKLARIFIKASI DINAS:** Direktur Perusda Jembrana I Gusti Kade Kusuma Wijaya dan Kadis PMPTSP dan Naker Jembrana Ni Nengah Wartini (foto kanan), kemarin.

pemegang saham menyelesaikan masalah Perusda ini," pungkasnya. Itu berarti, nasib Dirut Perusda kini berada di tangan Bupati Jembrana.

Sementara itu, Direktur Perusda Jembrana I Gusti Kade Kusuma Wijaya kembali menegaskan bahwa surat nonjob yang telah

dikeluarkan bukan pemberhentian. Dijelaskan, pegawai untuk sementara tidak diberi pekerjaan karena memang tidak ada usaha lagi di perusahaan. "Pekerjaan saja tidak ada. Apalagi uang untuk menggaji mereka. Daripada terus ngantor, tapi nggak ada pekerjaan, kami

**Kami juga menunggu dari pengawas dan pemegang saham menyelesaikan masalah Perusda ini."**

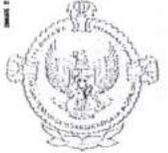
**Ni Nengah Wartini**  
Kadis PMPTSP dan Naker  
Pemkab Jembrana

putuskan nonjob. Mereka juga sudah setuju," tegas Kusuma Wijaya usai klarifikasi di Dinas, kemarin.

Keputusan tersebut bisa dicabut, jika dilakukan pemanggilan pegawai yang sudah dinonjobkan. Pemanggilan dilakukan jika ada pekerjaan yang sesuai kebutuhan pegawai yang memang berkompeten. "Saya bebaskan mereka

Edisi : Selasa, 8 Januari 2019

Hal. : 5



## Radar Bali

untuk bekerja di luar, sambil menunggu unit-unit usaha perusda yang akan dibangun," ujarnya.

Kemudian, pegawai yang akan dipanggil untuk bekerja lagi di perusda diminta untuk membawa ide usaha yang sekiranya bisa dikerjakan oleh Perusda Jembrana. "Ini sekian upaya yang kami lakukan untuk membuka usaha baru," ungkapnya.

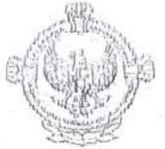
Mengenai desakan dewan yang meminta Direktur Perusda mundur karena dinilai gagal mengelola perusda, Kusuma menyatakan, desakan tersebut adalah motivasi untuk memperbaiki perusda. Kusuma Wijaya sendiri juga mengaku sudah diagendakan dipanggil DPRD Jembrana. Namun soal waktu pemanggilan belum ditentukan.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Jembrana I Wayan Wardana yang sebelumnya mendesak Direktur Perusda untuk mundur, kemarin tidak bisa dikonfirmasi. Saat koran ini mendatangi gedung DPRD Jembrana, Wardana tidak ada di ruangan. Lalu saat coba dihubungi via ponsel, Wardana tidak mengangkat telepon dari wartawan koran ini, meski ada nada sambung.

Seperti diberitakan sebelumnya, Perusda Jembrana memberhentikan semua pegawainya karena tidak ada uang untuk membayar gaji mereka. Perusda Jembrana juga menunggak gaji pegawai selama delapan bulan dengan nilai Rp 300 juta lebih. Pegawai yang diberhentikan tersebut dibebastugaskan tanpa gaji dan pesangon. (bas/han)

Edisi : \_\_\_\_\_

Hal. : \_\_\_\_\_



## Sebagian PNS yang Terjerat Korupsi Tak Terima Diberhentikan

**AMLAPURA, TRIBUN BALI** - Tujuh PNS di Pemkab Karangasem diberhentikan secara tak hormat. Mereka diberhentikan karena terlibat kasus tindak pidana korupsi. Surat keputusan pemberhentian dari kementerian turun akhir Bulan Desember 2018 lalu.

Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karangasem, I Gusti Gede Rinceg menjelaskan, tujuh PNS yang diberhentikan tersebut, empat orang bertugas di Disdikpora, dua di Disperindag, dan seorang di Dinas Lingkungan Hidup.

"Tujuh PNS yang diberhentikan sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap. Mereka diberhentikan akhir 2018. Surat keputusan (SK) pemberhentian sudah diserahkan ke yang bersangkutan. Sebagian PNS terima, ada juga tak me-

nerima keputusan ini," kata Gusti Gede Rinceg, Kamis (10/1).

Ia mengatakan, pemberhentian beberapa PNS berpedoman pada SK bersama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negera, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Keputusan ini tertuang pada nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, serta 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum ke PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena lakukan tindak kejahatan jabatan.

Sebelum menyerahkan SK pemberhentian ke PNS yang bersangkutan, Bupati dan Sekda, sempat melakukan konsultasi ke BKN. Hasilnya Pemkab diminta segera menindaklanjuti keputus-

an dari tiga kementerian dan memproses PNS bersangkutan. "Karena diberhentikan tujuh PNS ini tidak dapat dana pensiun," imbuh Rinceg.

Sementara itu, di Pemkab Bangli, empat PNS juga diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penegakan hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Bangli, Ni Putu Kosalireni menjelaskan, pemberhentian ini menyangkut PNS yang melakukan tipikor. "Berdasarkan daftar nama dari BKN, ada empat PNS aktif yang diberhentikan dengan tidak hormat karena kasus korupsi," katanya. **(ful/mer)**



# Pemkab Menunggak Rp 300 M

■ 24 Proyek di Badung Molor

**MANGUPURA, TRIBUN BALI**—Sebanyak 24 proyek di Badung molor pengerjaannya lantaran tidak dibayar tepat pada waktunya. Keterlambatan pembayaran membuat proyek diberikan perpanjangan waktu untuk dikerjakan. Pemkab Badung menunggak pembayaran pada rekanan Rp 300 miliar.

Informasi yang dihimpun di Pemkab Badung menyebutkan, selain keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan molornya proyek, keterlambatan juga ada dari rekanan sendiri, sehingga beberapa pelaksana proyek dikenakan denda. Ada 24 proyek yang proses penyelesaiannya mudur dari target.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, Ida Bagus Surya Suamba tidak menampik puluhan proyek molor. Namun ia mengatakan ada beberapa proyek dari jumlah tersebut di antaranya tidak langsung didenda, melainkan pengampunan atau perpanjangan proses penyelesaian tanpa dituntut denda.

"Memang ada tunggakan, bahkan tunggakan proyek mencapai Rp 300 miliar. Iya kami bisa bilang pemerintah wanprestasi karena tidak bisa memenuhi kewajiban," ujarnya Selasa (8/1). Disinggung mengenai proyek apa yang masih molor, pihaknya hanya mengaku beberapa proyek yang diperpanjang pekerjaannya antara lain Pasar Blahkiuh, Pematangan lahan sekolah, *ring river* di Puspem dan lain sebagainya. "Itu yang saya ingat. Ada beberapa proyek lagi," ucapnya

Penyebabnya molornya beragam. Mulai dari kendala-kendala yang ditimbulkan di lapangan, seperti ada perubahan dan penambahan pekerjaan dan termasuk pendanaan. "Yang diberikan perpanjangan itu, karena ada beberapa yang pengerjaannya kami tunda. Seperti misalnya ada pertemuan IMF, kan memang tidak diizinkan bekerja.

Seperti di Pasar Blahkiuh ada kendala di lapangan dan penambahan bangunan, seperti pembuatan padmasa-

na," terangnya.

Menurutnya, pihak rekanan akan terus melakukan penyelesaian proyek. Sehingga proyek tersebut selesai. Disinggung mengenai kapan pembayaran proyek yang tertunda, pihaknya belum mengetahui secara pasti. Ia menyarankan untuk menanyakan ke Sekretaris Daerah (Setda) Badung. "Kalau pembayarannya kapan, coba langsung tanya ke Bapak Setda," sarannya.

Ditemui di ruang kerjanya, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Wayan Adi Arnawa berjanji segera melunasi tunggakan yang belum dibayarkan. "Kami berterimakasih, karena pihak rekanan mau mengerti kondisi kami, dan tentunya kami akan segera membayar sisa yang belum terbayarkan," ungkapnya. Tunggakan pembayaran karena adanya penyesuaian PAD Badung. (gus)

Edisi : Rabu, 9 Januari 2019

Hal : 0



# RSUD Terancam Tak Belanja Obat

## ■ Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 12 Miliar

**SEMARAPURA, TRIBUN BALI** - Jumlah tunggakan BPJS Kesehatan kepada RSUD Klungkung mencapai Rp 12 miliar. Hal ini tidak hanya mempengaruhi pembayaran jasa pelayanan (jaspel) kepada tenaga medis dan para medis. Jika tunggakan itu tak kunjung dibayarkan hingga Januari 2018, dikhawatirkan RSUD Klungkung tidak bisa belanja obat-obatan untuk keperluan pelayanannya.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Klungkung, dr I Nyoman Kesuma menjelaskan, berdasarkan hitungan pihak RSUD, jumlah tunggakan dari BPJS Kesehatan hingga bulan November sekitar Rp 12 miliar.

"Verifikasi kan baru hingga bulan Oktober sehingga diakui utang sekitar Rp 6 miliar. Tapi kalau tunggakan hingga November hitungan kami sekitar Rp 6 miliar," ungkap Kesuma, Minggu (6/1).

Ia mengatakan, pihak BPJS belum membayarkan tunggakan itu karena masih ada audit

dari BPKP sejak Kamis (3/1) hingga delapan hari ke depan. Ia pun berharap tunggakan itu segera dapat dibayarkan setelah audit selesai dilakukan.

"Nanti kan hasil auditnya bagaimana, apakah bisa segera dicairkan dari pusat atau bagaimana," ungkapnya.

Tunggakan ini menyebabkan pihak RSUD Klungkung tidak dapat membayarkan jasa pelayanan kepada para petugas medisnya. "Bulan November kami tidak bisa membayar selama sebulan. Sementara jasa pelayanan terhadap pasien BPJS, tidak bisa kami bayarkan selama dua bulan yakni November dan Desember," ungkap Kesuma.

Tidak hanya itu, jika bulan Januari ini tunggakan itu tidak dibayarkan, Pihak rumah sakit khawatir tidak dapat belanja obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. "Obat-obatan sementara sebenarnya masih aman. Tapi jika Januari tunggakan itu tidak dibayarkan, kami kha-

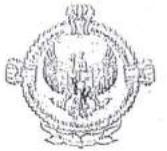
watir tidak bisa belanja obat," keluhnya.

### Rp 1 M Hilang Tiap Bulan

Usai penerapan sistem rujukan berjenjang online BPJS Kesehatan yang dilaksanakan bulan Oktober 2018 lalu, RSUD Klungkung kehilangan pendapatan sekitar Rp 1 miliar tiap bulan. Sebelum penerapan rujukan berjenjang, pendapatan rata-rata RSUD Klungkung mencapai Rp 5 miliar per bulan.

Hal itu sebagian besar pasien atau sekitar 92 persen adalah peserta BPJS. "Setelah rujukan berjenjang, pendapatan turun menjadi rata-rata Rp 4 miliar per bulan. Hilang lagi Rp 1 miliar per bulan," ungkap Kesuma.

RSUD Klungkung banyak menerima keluhan dari pasien, terkait sistem rujukan berjenjang berbasis online yang mulai efektif diterapkan oleh BPJS Kesehatan per Oktober 2018 lalu. Pasien menilai, sistem ini menyulitkan

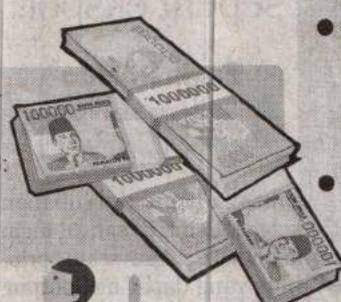


## UTANG

mereka karena saat mendapat rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) pertama, mereka tidak bisa langsung ke RSUD Klungkung (tipe B), melainkan ke rumah sakit tipe C.

Pasien dalam kasus tertentu yang tidak bisa ditangani di rumah sakit tipe C di Klungkung, harus dirujuk di rumah sakit tipe C di kabupaten lain. Meskipun seharusnya pasien tersebut dapat ditangani di RSUD Klungkung. **(mit)**

● **Tunggakan BPJS terhadap RSUD Klungkung hingga November 2018: RP 12 MILIAR**



● **RSUD masih menunggu pencairan setelah dilakukannya audit oleh BPKP**

● **Jika tak kunjung dibayarkan, dikhawatirkan pihak RSUD kesulitan belanja obat-obatan**

● **Pendapatan RSUD Klungkung di tahun tahun 2018: RP 64 MILIAR**

● **Target pendapatan RSUD Klungkung di tahun 2018: RP 65 MILIAR**

## Evaluasi Rujukan Berjenjang

**KEPALA** BPJS Kesehatan Cabang Bali Timur, Endang Triana Simanjuntak menjelaskan, rujukan online ini sudah berdasarkan Permenkes Nomor 01 Tahun 2012 tentang sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan. Tujuan sistem ini untuk memastikan setiap rujukan yang keluar sesuai dengan kebutuhan dan rencana medis yang ingin ditatalaksanakan kepada peserta.

Setiap rumah sakit melayati sesuai dengan kompetensi dari rumah sakit itu. Sistem ini juga diatur untuk membagi dan mendistribusikan pelayanan kesehatan. Sehingga tidak terjadi penumpukan antrean peserta di satu rumah sakit.

Atas persoalan itu, Bupati Suwirta berulang kali protes ke BPJS Kesehatan Cabang Klungkung. Bahkan bupati asal Ceningan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida itu sempat bersurat langsung ke Presiden Joko Widodo, ketua Komisi IX DPR RI, menteri Kesehatan, dan direktur BPJS. Surat tertanggal 19 Oktober 2018 itu pada intinya meminta supaya rujukan berjenjang dievaluasi. "Tapi sampai sekarang masih berlaku rujukan berjenjang," ujar Dirut RSUD Klungkung, dr I Nyoman Kesuma. **(mit)**



INFO GRAFIS: TRIBUN BALI/ DWI S

Edisi : \_\_\_\_\_

Hal : \_\_\_\_\_



# Gede Yuniarta Minta Pemkab Audit Perusda

- **Kebangkrutan Berujung Nonjobnya 10 Pegawai**
- **Gaji Selama Delapan Bulan Juga Belum Dibayar**

**NEGARA, TRIBUN BALI** - Sebanyak 10 pegawai yang bekerja di Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Jembrana diberhentikan. Keputusan ini pun dianggap sepihak. Puncaknya, mereka menggeruduk Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana, Rabu (9/1).

Pantauan *Tribun Bali*, tujuh mantan pegawai datang untuk mengadukan masalah ini. Mereka menyampaikan tuntutan ihwal kejelasan status. "Kedatangan kami adalah meminta supaya masalah ini segera diselesaikan," ucap satu mantan pegawai Perusda Jembrana, Yunita Prihatini.

Selain kepastian status, tuntutan kedua soal gaji yang belum dibayar selama delapan bulan pada 2018 lalu. Kemudian tuntutan terakhir adalah tanggung Pemkab Jembrana atas keputusan itu karena pegawai adalah aset dari Perusda.

Mantan pegawai Perusda lainnya, Putu Gede Yuniarta menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Jembrana selaku pemilik perusahaan diminta bertanggungjawab atas dinonjobkannya 10 pegawai. "Rata-rata 10 tahun lebih kami bekerja. Kenapa diperlakukan seperti ini, kami minta kejelasan dan pertanggungjawaban," pintanya.

Yuniarta berharap pem-



TRIBUN BALI/MADE ARDHIANGGA

**SAMPAIKAN PROTES** - Pegawai Perusda yang diberhentikan menggeruduk Dinas Penanaman Modal Jembrana, Rabu (9/1). Mereka menuntut pembayaran gaji dan kejelasan status.

kab diminta untuk melakukan audit terhadap Perusda Jembrana. Bahkan pemerintah didesak untuk memberhentikan Direktur Perusda Jembrana karena dinilai tidak bisa menjalankan perusahaan. "Kalau tidak mau memajukan perusahaan mundur saja. Lebih baik mundur, karena tidak becus bekerja," sahut pega-

wai lainnya menimpali.

Perusda Jembrana berada di bawah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana. Sepuluh pegawai tersebut dinonjobkan sejak 22 Desember 2018. Alasan pemberhentian karena Perusda bangkrut.

Kebangkrutan dan pemberhentian ini, berdasar

keterangan para pegawai disinyalir ada 'permainan' yang dilakukan oleh Perusda Jembrana. Misalnya k usaha sedot WC yang sebelumnya selalu tembus target Rp 18 juta dalam sebulan, lambat laun menurun. Bahkan beberapa bulan terakhir pendapatan yang masuk kepada keuangan hanya Rp 900 ribu. (ang)

Edisi : Kamis, 10 Januari 2019

Hal : 5